



Judul : Komisi X: Perbesar Investasi Literasi
Tanggal : Minggu, 19 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Masalah Sektor Perencanaan

Komisi X: Perbesar Investasi Literasi

ANGGOTA Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi mendorong adanya investasi literasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang andal demi kemajuan bangsa. Sayangnya ini cukup berat lantaran masih sedikit sekali orang yang memiliki komitmen membangun literasi.

“Saya sampai sekarang merasa yakin bahwa tidak lebih dari 5 persen orang yang memiliki komitmen di bidang literasi. Selebihnya, belum masuk ke sana,” kata Nur Purnamasidi di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Makanya, dia pernah mengusulkan agar bidang perencanaan di seluruh tingkatan Pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa dan kelurahan, diisi oleh pihak-pihak yang paham betul soal literasi. Perencanaan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis literasi, bukan sekadar *copy paste*.

“Yang terjadi sekarang ini kan selalu *copy paste*. Coba kita baca, misal di Kementerian PUPR, *copy paste* semua,” katanya.

Makanya, dia tidak heran jika beberapa kebijakan pem-

angunan infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR selalu berulang. Karena perencanaan yang duduk di sana tidak paham soal literasi.

“Mengapa misalnya setiap tahun harus bangun jembatan di situ lagi, di situ lagi? Kan gitu. Kalau dia punya literasi, saya yakin nggak akan dibangun (jembatan lagi) di situ. Mungkin perlu 3 tahun. Tapi karena dia nggak tahu literasi, dia akan *copy paste* terus,” terangnya.

Untuk itu, dia mendorong setiap perencanaan kebijakan yang diambil adalah benar-benar ter-

literasi dengan baik. Karenanya, dia mendorong agar kebijakan literasi ini terus ditingkatkan terutama di sektor perencanaan kebijakan.

“Sasaran kita itu meningkatkan literasi di perencanaannya. Kalau diperencanaan *ter-literate*, saya yakin tujuan kita mengembangkan literasi di Indonesia tercapai,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Golkar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengaku, sudah berupaya keras mendorong agar anggaran untuk mem-

bangun literasi ini benar-benar bisa ditingkatkan.

“Keinginan kami anggaran di perpustakaan itu minimal satu digit saja. Namun, sampai sekarang belum terpenuhi,” katanya.

Memang dana yang digelontorkan Pemerintah untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat besar, mencapai Rp 520 miliar per tahun. Besarnya DAK untuk belanja Perpusnas sebagai bentuk investasi negara untuk menjamin agar pembangunan literasi ini benar-benar terjamin. ■ KAL